



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : VIVI YULASWATI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3. NHK : 152767

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.543.525.000**

1. Tanah Seluas 514 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 961.063.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/75 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 622.350.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.470.112.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
6. Tanah Seluas 515 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 376.000.000**

1. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 89.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	276.984.734
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.344.318.351
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.629.828.085
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.629.828.085

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.